

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakanaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Agus, Kurniawan. 2005. *Tansformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Erlangga
- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Achmat, Batinggi. 1999. *Manajerial Pelayanan Umum*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 1998. *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi kedua. Gadjah Mada Universiy Press.
- Gibson,dkk. 1991. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- H.A.S.Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Media Press.
- Islamy, M. Irfan. 1994. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Mahmudi, 2005.*Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Markus, Zahnd. 2006. *Perancangan Kota Secara Terpadu*. Jakarta.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik),Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan.Produktivitas Menuju Good overnance (Kepemerintahan Yang Baik). Bagian Kedua*. Bandung: Mandar Maju.

- Sedarmayanti, 2001. *Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Strees, Richard. M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.

Jurnal:

- Indra, M. (2015). Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Electronic-kartu Tanda Penduduk (E-ktip) di Kecamatan Tampan Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2(1).
- Nazaruddin, N. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program E-KTP (Studi Pelaksanaan Perekaman Data Di Kabupaten Hulu Sungai Utara). *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 2 (2).
- Mahardika, I. G. N., Ibrahim, R., & Satyawati, N. G. A. D. Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Hal Perekaman Data Di Kabupaten Gianyar.
- Maulida, Nurul Dahlia A. (2014). Studi Tentang Efektifitas Dalam Sosialisasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda.
- Bastiar, M, Sutadji. Irawan, Bambang. (2014). Implementasi Kebijakan E-Ktp Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat.
- Fitriani, I. (2017). Evaluasi Kebijakan e-KTP dalam Mewujudkan Mutu Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Jurnal Renaissance*, 2(01), 115-124.
- Reza, F. Rochmah, S. Siswidiyanto. (2013). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi tentang Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Depok).

- Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 27(2), 193-201.
- Syahraji, S., & Nasution, I. (2013). Sistem Administrasi Pelayanan E-KTP di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh tengah. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 1(1), 16-20.
- Rivai, A. (2017). Implementasi Pelayanan E-KTP Di Kantor Camat Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Paradigma (JP)*, 3(3), 291-300.

Undang-Undang:

- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara nasional.
- PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006.
- Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penetapan KTP Elektronik paling lambat 2012.
- Permendagri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional.
- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Artikel Online:

<https://id.scribd.com/document/365179387/pengertian-Mix-Method-docx>

Diakses pada tanggal 14 Februari 2019, pukul 23.12 WIB